

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. P. Parlindungan, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, 1997, Mandar Maju, , Bandung.
- AP. Parlindungan, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, 1998, Mandar Maju, Bandung.
- Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, 2000, Rineka Cipta, ,Jakarta
- B. Arief Shidarta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, 2007, PT Refika Aditama, Bandung.
- Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, 2011, Margaretha Pustaka, Jakarta,
- Bernhard Limbong, *Pengadaan tanah Untuk Pembangunan-Regulasi Kompensasi, Penegakan Hukum*, 2011, Margaret Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya* , 2005, Djambatan, Jakarta
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, 2007, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, 2003, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, 2007, Universitas Trisakti, Jakarta
- Drs. Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, 1976, Bulan Bintang, Jakarta.

- Eddy Ruhiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, 1999, PT. Alumni, Bandung.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, _____, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Hasim Purba, *Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan* Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010.
- Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, 2001, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 1979, Aksara Baru, Jakarta.
- M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, _____, Eresco, Eresco, Bandung .
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, 2008, Kompas, Jakarta.
- Muhammad Amin Suma. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, 2013, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, 2007, PT Alumni, Bandung
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 1999, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1994, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, 1999, Alumni, Bandung.
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi: Pelaksanaan Hukum*

- Pertanahan dalam Praktek*, 2005, CV Mandar Maju. Bandung.
- Rusmadi Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, 1991, Bandung, Alumni
- Saleh, K. Wantjik. *Hak Atas Tanah*, 1985, Yudistira, Jakarta.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, 1990, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1982, CV Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior, Concepts, Controversies, Applications*, 1996, prentice-hall International Editions, USA, Bernhard Limbong, hlm. 39
- Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RP*”
Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, 2015, Media Perkasa, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undang

- Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok Pokok
Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah
Asal Konversi

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

C. Sumber Lainnya

Badan Pertanahan Nasional. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.
[http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-
Pertanahan.](http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan)

Hak Atas Tanah. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.
[https://tokoh.id/biografi/2-direktori/negara-belum-jamin-hak-atas-
tanah/](https://tokoh.id/biografi/2-direktori/negara-belum-jamin-hak-atas-tanah/)

Ulfia Hasanah, "*Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, (2012), hlm. 2.